

3

NEW NORMAL SEBAGAI POLITIK BONUM COMMUNE DI MASA PANDEMI

MATHIAS JEBARU ADON

Received: 2 Maret 2021; Accepted: 20 April 2021; Published: 30 Juni 2021

Ed. 2021; 4 (2): 231 - 241

Abstract

The Covid-19 pandemic which engulfs the world has affected almost all nations, including Indonesia. This crisis caused the Indonesian government to face a dilemmatic choice. Implementing a lockdown to control the spread of Covid-19 actually ravaged the economy. It had no other alternative to save the economic sector than by forcing implementation of 'the new normal'. This paper describes phenomenologically the implementation of the new normal policy in Indonesia using qualitative methods by exploring opinions and news items in Kompas newspaper, particularly how the Indonesian government's is moving the economic sector without sacrificing public welfare. The government considers the new normal as the most realistic step given the economic pressure and uncertainty about when Covid-19 will end. Therefore, new normal has become the *bonum commune* policy during the pandemic. The main principle of new normal as a political *bonum commune* is adapting one's lifestyle in accordance with the health protocol.

Keywords: The Covid-19 Pandemic, New Normal, Bonum Commune Politics and Adaptation.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang berada dalam krisis yang paling menakutkan yang belum pernah dialami selama bertahun-tahun. Wabah pandemi Covid-19 yang menyerang dunia pada awal tahun 2020 telah meluluhlantakkan semua sistem. Membawa dampak yang luar biasa. Wabah ini mengubah wajah dunia tidak hanya pada aspek ekonomi dan kesehatan tetapi juga pada perubahan interaksi sosial masyarakat ataupun pola kerja. Indonesia sebagai salah satu bangsa yang tengah memasuki masa sulit ini mengalami guncangan yang begitu hebat. Sistem keuangan lunglai dan sistem kesehatan menanggung beban berat. Keadaan ini membuat pemerintah dihadap-

kan pada pilihan dilematis menyelamatkan perekonomian tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat. Kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial bersekala besar yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah memukul sektor usaha. Beban ekonomi menjadi berat. Pemerintah memperbesar defisit anggaran hingga 6,27 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini. Seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuannya dengan tim redaksi Kompas tanggal 29 Mei 2020, masalah kesehatan harus diselesaikan agar ekonomi dapat berjalan. Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. Jika kesehatan tidak ditangani dengan baik maka perbaikan ekonomi sulit diatasi.

Dalam situasi ini, dunia seakan berhenti berputar untuk menemukan *new normal* yang belum bisa diketahui kapan situasi normal yang baru itu akan terjadi. Hal ini bergantung pada pemimpin bangsa atau negara yang menangani badai pandemi ini. Dalam situasi krisis seperti ini yang dibutuhkan adalah kecepatan bertindak dan kejujuran data. Pertengahan Mei pemerintah menghimbau masyarakat untuk hidup damai dan berdampingan dengan Covid-19. Situasi ini disebut *new normal*. Istilah *new normal* merujuk pada aturan baru (buatan) yang lebih longgar daripada sebelumnya. Istilah *new normal* juga didefinisikan dengan berbagai perubahan, termasuk perubahan cara berpikir, berperilaku, dan berelasi dengan sesama. Dengan perubahan itu aktivitas dan produktivitas masyarakat yang sempat terhenti kembali bergulir. Perubahan tatanan hidup baru ini adalah kebijakan politik *bonum commune* yang mesti diambil pemerintah Indonesia.

Dikatakan pilihan politik *bonum commune* karena pemerintah tidak memiliki opsi lain sebagai alternatif dalam usaha menyelamatkan perekonomian ditengah merebaknya penyebaran virus Corona. Karena itu, tulisan ini akan menguraikan pertama-tama dampak pandemi covid-19 bagi kehidupan social politik di Indonesia. Kedua, bagaimana *new normal* sebagai politik *bonum commune* diterapkan di Indonesia serta kendala yang dihadapi pemerintah, di samping kekhawatiran masyarakat ketika kebijakan hidup dalam norma baru mulai diberlakukan. Selanjutnya tulisan ini akan membahas bagaimana masyarakat Indonesia mesti beradaptasi dengan Covid-19 dengan cara menyesuaikan hidup sesuai protokol kesehatan.

PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 terbukti telah memporak-porandakan dunia, tidak hanya sektor per-

ekonomian tetapi nyaris semua sektor. Semua orang diminta membatasi interaksi fisik: bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan menjaga kesehatan. Keadaan ini membawa bangsa Indonesia pada dua situasi yang sering muncul. Pertama, ketidakberdayaan dan kedua tawaran solusi masalah berupa prosedur yang mensyaratkan kebijakan politis. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, krisis ini akan membawa kontraksi yang hebat. Krisis ini nampak sebagian besar dalam indikator perekonomian yang memburuk signifikan. Perdagangan dunia (ekspor-impor), produksi manufactur, pengangguran, harga komoditas, tingkat kepercayaan konsumen dan indikator lain menunjukkan tingkat keparahan yang akut.

Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara mengalami kontraksi yang begitu dalam, misalnya China dengan pertumbuhan minus 6,8 persen terburuk dalam sejarah perekonomian China. Di Eropa, Perancis dan Spanyol minus 4,1 persen. Di ASEAN, Singapura yang sangat terekspos dengan perdagangan internasional minus 2,2 persen (HENDRANATA, 2020). Hal ini menunjukkan efek negatif Covid-19 sangat serius merusak urat nadi perekonomian. Dalam konteks Indonesia pemerintah melalui melalui Perppu Keuangan Negara dan Sistem Keuangan serta Perpres Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melontorkan dana sebesar Rp 405 triliun atau sebesar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk melawan wabah Covid-19 (FARHAN, 2020). Tambahan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani masalah kesehatan Covid-19. Tetapi hal ini tetap bergantung pada kecepatan pencairan anggaran dan fleksibilitas penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Surat Edaran Mendagri

Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah (“*Percepatan Relokasi Dana*”, Kompas 4 April 2020), menghimbau agar mempercepat pencairan anggaran Covid-19. Jika dalam tujuh hari sejak instruksi dikeluarkan percepatan tidak dilakukan, sanksi akan dijatuhkan. Kementerian Keuangan akan bakal memotong dana transfer ke daerah. Selain sektor ekonomi yang diteror oleh virus Corona, juga sektor kesehatan. Di Indonesia sejak 2 orang diumumkan tertular pertama pada 2 Maret 2020, hanya dalam waktu dua bulan menembus angka 10.000 orang (KALLA, 2020). Jika tidak disertai disiplin masyarakat untuk berada di rumah dengan aturan dan sanksi tegas, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan tindakan penularan lain, maka tingkat penularan 350 orang perhari positif berikutnya akan melonjak dua kali lipat tertular disertai angka kematian.

Di antara negara yang terdampak Covid-19, beberapa negara berhasil menurunkan jumlah penderita. China, Korea, Vietnam, Taiwan dan Selandia Baru dianggap berhasil memutus rantai penularan Covid-19. Hal ini berbeda dengan beberapa negara maju yang sistem kesehatan dan tingkat kehidupannya lebih baik, justru sangat parah dalam penularan seperti; AS, Spanyol, Italia, Perancis dan Inggris. Keberhasilan negara Asia dalam menangani Covid-19 terletak pada ketegasan dan kecepatan bertindak.

Sejak awal China, Vietnam, Selandia Baru menetapkan *lockdown*, sedangkan Korea Selatan tanpa *lockdown*. Korea Selatan menempatkan hampir 60 unit alat tes laboratorium di setiap kota. Sedangkan Taiwan sejak Desember 2019, melakukan persiapan berkat laporan intelijen mereka di Wuhan. Di Indonesia baru pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden

Jokowi menandatangani dan mengumumkan 3 kebijakan penting bagi bangsa Indonesia dalam perang melawan Covid. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 (AHMAD, 2020). Terbitnya tiga regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 tetapi juga menunjukkan pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali mengorbankan semua imajinasi tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar, pemerintah mendorong warga agar bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Persoalannya, upaya deteksi Covid-19 di Indonesia terkendala minimnya alat-alat kesehatan. Hingga empat bulan sejak diumumkannya pasien pertama dan kedua, Indonesia masih bermasalah dengan tes molekuler untuk Covid-19 (“*Tes Covid Jadi Kendala*”, Kompas 15 Juni 2020). Berdasarkan hal itu, beberapa ahli meramalkan perjuangan menghadapi Covid-19 di tanah air bakal berlangsung lama. Jumlah yang terpapar virus Corona kian banyak meski PSBB diberlakukan. Di sisi lain jumlah warga terdampak ekonomi-sosial Covid-19 akan semakin meningkat drastis menjadi tambahan 7,05 juta penganggur yang sudah ada sebelumnya.

Banyak warga yang “terkapar” yang bekerja di sektor formal; pertanian, perkebunan, industri,

jasa dan digital. Lebih banyak lagi warga yang “terkapar” yang bekerja di sektor informal seperti tukang ojek, sopir taksi, pedagang kaki lima, buruh tani dan tukang parkir. Mereka hidup dari pendapatan harian yang hilang saat pemerintah menerapkan aneka kebijakan menghadapi Covid-19. Selain krisis kesehatan dan krisis ekonomi-sosial, sektor pendidikan mengalami revolusi yang cukup signifikan. Jika kemarin siswa terutama belajar dari sekolah, kini justru belajar dari rumah. Dalam proses pembelajaran siswa tidak lagi diawasi guru tetapi siswa perlu mengelola proses belajarnya sendiri. Sekarang rumah telah menjadi sekolah, dan orang tua menjadi guru yang menyadarkan semua orang bahwa pembuatan konten bagi guru dan murid untuk belajar harus banyak disatukan. Anak dan orang tua lebih baik belajar bersama, bukan memaksa cara belajarnya dahulu. Sebab belajar akan lebih mengasyikkan, jika ada kolaborasi antara orang tua dan anak. Demikian pula dengan guru harus duduk sama tinggi untuk berkolaborasi belajar bersama.

Kendala yang terjadi saat ini adalah adanya ketimpangan akses informasi digital yang melumpuhkan pendidikan terutama bagi daerah terpinggirkan. Meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebutkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan guru dan murid untuk membeli kuota internet dalam rangka mendukung belajar dari rumah. Namun, keterbatasan jaringan internet dan listrik serta ketersediaan sarana teknologi seperti komputer dan telepon pintar yang minim menjadi problem di daerah-daerah pelosok. UNESCO melaporkan sekitar 830 juta pelajar tak memiliki akses ke komputer. Lebih dari 40 persen pelajar tak memiliki akses internet di rumahnya untuk dapat melanjutkan pendidikan di rumahnya (PRANOTO, 2020).

Dari kenyataan bahwa vaksin untuk virus ini masih butuh waktu sekitar 18 bulan lagi, terlalu berkhayal berharap tatanan kehidupan akan segera kembali seperti saat prawabah. Mengatasi kesenjangan di atas diperlukan perubahan menyeluruh pada setiap aspek kehidupan. Suatu tatanan hidup baru. Kehidupan baru ini dinamakan normal baru. *New normal* atau normal baru adalah keadaan dimana masyarakat dipaksa menerima kehadiran virus Corona sebagai suatu kenyataan meski sangat membahayakan. Dalam hal ini bidang kesehatan, ekonomi, proses politik, budaya kerja, semua mesti berubah dan memformat ulang aturan mainnya.

New Normal Sebagai Politik

Bonum Commune di Masa pandemi

New Normal adalah pilihan tatanan kehidupan politik yang tepat pada masa pandemi Covid-19. Dikatakan pilihan yang tepat karena mengubah seluruh tatanan hidup bersama bangsa demi tercapainya kesejahteraan bersama atau *bonum commune* dalam berbagai bidang kehidupan secara etis. Perubahan baru yang menyeluruh ini dikenal dengan normal baru (*new normal*). Sebagai suatu tatanan hidup baru, *new normal* adalah kebijakan politik. Politik sebagaimana yang didefinisikan oleh HANNAH ARENDT dalam bukunya “*The Human Condition*”, menjelaskan politik sebagai bagian dari tindakan manusia seperti halnya seorang manusia bekerja untuk keluarganya; berkarya menghasilkan patung, lukisan, musik, lagu dll adalah juga berpolitik. Dalam pengertian ini, berpolitik berarti bertindak dalam polis (negara). Warga masyarakat yang menempati suatu negara adalah *bios politikus*, makhluk berpolis, makhluk bernegara. Maka politik bukan masalah pengaturan administrasi negara, juga tidak direduksi dalam keterlibatan dengan partai politik, tetapi dalam kepedulian dan keterlibatan dalam *res publica*.

Tidak mungkin seorang berkewarganegaraan berkata “tidak” terhadap politik sebab dengan menjadi warga suatu negara, ia secara sadar menjadi bagian dari tubuh polis-politik itu sendiri. Ketika politik diartikan demikian maka tidak berlebihan kalau *new normal* dikatakan sebagai politik *bonum commune* di masa pandemi, karena bertujuan melindungi masyarakat dari penyebaran virus corona, dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat yang sempat terhenti karena kebijakan pembatasan sosial bersekala besar dan karantina wilayah (*lockdown*). *New Normal* sebagai politik *bonum commune* adalah istilah yang menggambarkan keadaan normal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Presiden Joko Widodo menggunakan istilah tatanan kehidupan baru untuk menggantikan *new normal*. Dari penggunaannya, *new normal* bukanlah kosa kata yang baru muncul selama pandemi Covid-19. Istilah tersebut ternyata telah digunakan dalam berbagai konteks dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Pada abad 21, istilah the *new normal* pertama kali digunakan oleh ROGER MCNAMEE. Dalam pengantar buku karangan John Putzier *Weirdos in the Workplace: The New Normal? Thriving in the Age of the Individual* (2004) (CHRYSHNA, 2020). Pada saat itu istilah the *new normal* dipahami sebagai situasi yang baru, saat seseorang bersedia mengikuti aturan main yang baru dalam jangka panjang.

Di bidang ekonomi, penggunaan istilah *new normal* dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang mengikuti krisis finansial tahun 2008. *New normal* digunakan untuk menggambarkan situasi krisis finansial saat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lambat, dan intervensi pemerintah yang lebih kuat dalam pasar keuangan. Istilah tersebut digunakan untuk mengingatkan pasar dan pembuat kebijakan bahwa ekonomi industri

pascakrisis akan memulihkan diri dengan cara-cara yang baru. Selama pandemi Covid-19, istilah *new normal* muncul untuk menggabungkan hidup yang berdamai dengan Covid-19. Berdamai dengan Covid-19 maksudnya tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambahkan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan sekaligus upaya menggerakkan sektor ekonomi.

Konsep *new normal* muncul pertama kali di masa pandemi dalam protokol panduan WHO bagi negara-negara yang berniat melonggarkan kebijakan terkait penangangan Covid-19 pada 16 April 2020. Kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah nyatanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, selain banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, berdiam diri di rumah juga memunculkan dampak psikologis yang tidak kalah berat. Tetapi menurut WHO, konsep *New Normal* tidak dapat dilakukan begitu saja atau hanya dengan melonggarkan *physical distancing*.

WHO menyampaikan enam panduan yang menjadi kriteria bagi negara yang ingin melonggarkan kebijakan. Pertama, penularan telah terkontrol. Kedua, kapasitas sistem kesehatan telah tersedia dan mampu digunakan untuk melakukan deteksi, tes, isolasi, dan pengobatan bagi setiap kasus Covid-19 dan dapat menelusuri tiap kontak. Ketiga, risiko wabah di tempat dengan kemungkinan penularan tinggi telah diminimalkan. Keempat, kebijakan pencegahan telah diterapkan di tempat kerja, sekolah, maupun tempat-tempat penting. Kelima, risiko penularan kasus impor dan ekspor telah dikelola. Keenam, tiap komunitas telah sepenuhnya terdidik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk menyesuaikan diri dengan normal baru (CHRYSHNA, 2020). Dari kebijakan-

kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa *new normal* adalah sebuah aktivitas politik *bonum commune* dimana seluruh masyarakat terlibat dalam upaya bersama mencegah kebangkitan kasus baru dan bersama-sama menggerakkan perekonomian bangsa.

Penerapan New Normal di Indonesia

Kebijakan *new normal* di Indonesia pada awalnya menuai kritik. Pemerintah dianggap terlalu gegabah meminta masyarakat bersiap menjalankan *new normal*, sementara kasus Covid-19 terus meningkat. Istilah *new normal* baru digunakan pertama kali dalam dokumen paket panduan lintas sektoral yang disusun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Mei 2020. Sehari kemudian, Bappenas menggelar konferensi pers Perumusan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 pada 21 Mei 2020. Terdapat tiga kriteria bagi daerah yang ingin melakukan penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni pertama, angka reproduksi efektif atau $R_t < 1$ selama dua minggu berturut-turut; kedua, kapasitas sistem pelayanan kesehatan yang mensyaratkan kapasitas maksimal tempat tidur rumah sakit dan instalasi gawat darurat untuk perawatan Covid-19 lebih besar dari jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit; ketiga, surveilans, artinya kapasitas tes *swab* yang cukup (CHRYSHNA, 2020). Dengan memenuhi kriteria-kriteria-kriteria ini suatu daerah dianggap layak menerapkan *new normal*.

Hasil jajak pendapat Kompas 15 Juni 2020 menunjukkan optimisme dan kekhawatiran masyarakat akan adanya gelombang baru penularan Covid-19 ketika normal baru diterapkan (“Normal Baru”, Kompas, 15 Juni 2020). Sebanyak 97 persen responden menyatakan siap menaati protokol kesehatan ditengah kehidupan normal baru. Sebagian

besar responden akan mempersiapkan kelengkapan yang mendukung protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, pelindung wajah dan kelengkapan lain. Pemerintah sendiri menilai bahwa *new normal* adalah langkah paling realistis saat ini mengingat tekanan ekonomi negara dan belum adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Selaras dengan hal tersebut, 40,3 persen responden dari hasil jajak pendapat Kompas di atas sepakat bahwa pemberlakuan *new normal* adalah langkah yang tepat, tetapi harus dilakukan berdasarkan protokol kesehatan. Prinsip utama *new normal* menurut pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pola hidup.

Pendisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan menjadi kunci pelaksanaan *new normal*, akan tetapi siapa yang dapat menjamin masyarakat akan disiplin? Sekitar 28 persen responden menyadari upaya hidup berdampingan bukan tanpa resiko. Mereka mengaku cemas terhadap adanya gelombang kedua akibat pelanggaran pembatasan sosial di tengah belum redanya pandemi. Sekitar 20 responden lainnya dari hasil jajak pendapat tersebut menyatakan pemberlakuan *new normal* seharusnya hanya diberlakukan di daerah yang berstatus zona hijau. Sementara 29 persen lainnya justru menaruh kekhawatiran pada realisasi normal baru oleh pemerintah karena takut adanya gelombang kedua penularan.

Beragamnya respon publik menjadi sinyal bahwa proses menuju tatanan hidup baru tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab normal baru adalah tatanan menuju tataran hidup berkualitas, membangun kebaruan peradaban yang makin menyempurnakan kehidupan bersama. Mengingat hal itu pemerintah perlu mengedukasi publik dengan komunikasi efektif yang mudah diterima sebab spektrum normal baru amat luas dan rumit

karena mencakup segala aspek kehidupan. Pengetahuan dan tanggung jawab publik menjadi landasan penting dalam membangun kebiasaan baru. Hal ini menyangkut hal-hal praktis normal baru seperti disiplin menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, serta perubahan simbol-simbol keakraban; bersalaman dan berpelukkan. Metode edukasi kepada masyarakat pun tidak melulu dengan penyampaian informasi langsung. Bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu peraga seperti spanduk, poster dan kampanye melalui media sosial.

Penetapan tatanan kehidupan baru dengan pelonggaran pembatasan sosial bersekala besar sesungguhnya menuntut kesadaran bersama. Presiden Jokowi menggaungkan agar “berdamai” dengan korona (SANTOSO, 2020). Ajakan berdamai dimaknai menerima kenyataan adanya virus Corona, tetapi juga berusaha mengatasinya, melanjutkan hidup dan membangun negara. Dalam tatanan hidup baru ini semua sektor dipaksa mentransformasikan diri secara cepat dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Situasi yang memaksa ini ternyata berhasil mengubah pola kerja baru manusia yang didukung oleh kemajuan teknologi. Dalam bidang pendidikan transformasi itu nampak dari perubahan cara belajar konvensional dimana guru menjadi pelaku utama proses pembelajaran dalam interaksi dengan siswa menuju cara belajar daring dimana guru berkolaborasi bersama siswa dalam belajar.

Dalam bidang birokrasi wabah Covid-19 berhasil menciptakan ruang kerja baru atau dikenal *Working from Home* (WfH) yang menggantikan aktivitas manusia yang selama ini dilakukan secara manual. Ruang kerja baru ini memanfaatkan teknologi mutakhir seperti

teknologi informasi dan komunikasi, teknologi robot dan nano. Ruang kerja birokrasi ini membutuhkan 5 komponen; pertama, ruang kerja yang fleksibel dan berjejaring. ASN tidak harus ke kantor karena berbagai pekerjaan dapat dilakukan dimana saja. Dengan demikian mengurangi kemacetan dan mencegah penularan Covid-19. Kedua, pembelajaran superaplikasi (*superapp*) yang memungkinkan pekerjaan kantor dilakukan secara digital. Rapat, interaksi antar pegawai, proses kerja antar unit pemerintah, pelayanannya kepada masyarakat dan seluruh basis pekerjaan dapat dilakukan melalui media digital. Sehingga biaya operasional gedung diminimalisir. Ketiga, terjadinya peningkatan kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk *big data* dan AI. Keempat, karena dilakukan secara *on line* maka perlu adanya pemangkasan dan penyederhanaan proses birokrasi. Kelima, terpilihnya ASN berkualitas (PRASOJO, 2020).

Untuk mendukung revitalisasi dalam berbagai sektor kehidupan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memfasilitasi layanan koneksi internet guna mendukung kebijakan “Bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah”, termasuk menyediakan internet khusus di sektor pelayanan medis. Kemenkominfo juga mengoptimalkan layanan akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) ke wilayah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal (PLATE, 2020). Selain itu, Kemenkominfo juga membangun ekosistem digital dan infrastruktur telekomunikasi menuju *Digital Society*. Semua hal ini dipercepat pemerintah karena Covid-19. Selain itu, Kominfo juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi industri 4.0

dengan program *digital talent scholarship*. Sebuah program digital skill, seperti *programming*, *augmented reality* dan *digital entrepreneur* secara gratis (PLATE, 2020). Kebijakan dan program-program ini dilakukan pemerintah sebagai respons atas wabah Covid-19. Diharapkan kebijakan ini membawa kesejahteraan bersama (*bonum commune*) bagi bangsa Indonesia dan penyebaran Covid-19 dapat segera di atasi.

Beradaptasi di Era New Normal

Sudah lebih dari lima bulan bangsa Indonesia bergelut seru dengan super virus Covid-19 yang membawa semua orang pada pola hidup baru yang serba was-was. Dalam krisis kesehatan global ini sudah sewajarnya merasakan kecemasan, depresi atau semua jenis kelelahan mental dan hilangnya motivasi. Diperkirakan supervirus ini tak akan bisa musnah sama sekali. Kemampuannya menyebar, bermutasi dan beradaptasi dengan inang barunya sangat gesit. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Tanpa beradaptasi mustahil virus ini dapat dikendalikan.

Dalam masa transisi ini adalah hal wajar jika masyarakat mengalami ambivalen sedangkan pemerintah dihadapkan pada opsi kebijakan dilematis dan resiprokal. Mengutamakan kesehatan dengan memperketat PSBB akan semakin melumpuhkan perekonomian nasional. Mengendurkan PSBB, maka semakin sulit mengendalikan penularan Covid-19 (KRISTIADI, 2020). Setiap krisis sebenarnya mengungkap dengan jelas beberapa hal; mengenai kedalaman dan keluasan penderitaan manusia, kerja sama dan konflik antar masyarakat, pemimpin politik, birokrat dan pengusaha, persengkongkolan jahat antar pemimpin atau kecakapan pemimpin dalam menangani persoalan besar ini.

Wabah pandemi atau bencana besar lain yang menimpa dunia biasanya juga akan diikuti dengan kemunculan kelompok strategis konstruktif yang membawa normal baru tata politik, ekonomi dan kehidupan social masyarakat lebih baik atau sebaliknya. Seperti yang terjadi pada krisis ekonomi Eropa 2009 yang dibarengi kemunculan kelompok strategis destruktif yang merusak lebih dalam ekonomi negara lewat korupsi (ACHWAN, 2020). Tetapi syukurlah pemerintah Indonesia sejauh ini membuat kebijakan fleksibel untuk menjaga keseimbangan dua kecenderungan itu, dengan diberlakukannya normal baru. Karenanya *new normal* adalah langkah yang paling realistis yang diambil pemerintah di samping mengendalikan penyebaran Covid-19 tetapi juga, menghidupi perekonomian rakyat yang mulai lesu.

Selain itu, kompleksnya pengelolaan penanganan pandemi juga memerlukan komunikasi politik yang lebih akurat, solid, dan intensif sehingga tidak membingungkan masyarakat. Adaptasi perilaku dengan normal baru yang dilandasi kematangan pengetahuan umumnya akan jauh lebih efektif bagi masyarakat dalam memasuki normal baru. Ikhtiar negara memasuki normal baru di masa pandemi akan lebih cepat berhasil jika pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Di samping itu, semangat solidaritas sosial yang selama ini sudah berlangsung perlu lebih ditingkatkan terutama terkait disiplin mengikuti protokol kesehatan. *Stay safe, stay positive, stay educated* adalah platform yang mesti selalu didengungkan oleh pemerintah sehingga sistem imun tubuh masyarakat siap dalam melawan virus corona. Sebab dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, warga dapat membangun budaya disiplin dan gaya hidup sehat yang sangat berguna untuk bertahan hidup di tengah wabah.

Dalam proses edukasi, masyarakat mesti diposisikan sebagai agen perubahan, bukan obyek pandemi. Dengan demikian mereka dapat mempertahankan sistem imunnya dengan prima, baik dalam kemampuannya mengawasi, bertahan, memusnahkan maupun menghancurkan lawan seperti virus Covid-19 ini. Kecanggihan daya tahan tubuh ini juga tidak terlepas dari sikap toleran terhadap ketidakpastian selama masa pandemi ini. Dalam kondisi ini, alternatif terbaik adalah dengan mulai berpikir positif.

Situasi bekerja dari rumah yang sulit melihat arah kemajuan dan perkembangan pekerjaan atau perusahaan memang dapat melemahkan motivasi dan ritme kerja, maka hal yang perlu dilakukan adalah menjaga normalitas. Caranya bersikap toleran dengan ketidakpastian dan mengakuinya (RACHMAN dan LARASATI, 2020). Dengan begitu pikiran positif timbul dan tubuh akan merasakan kehangatan hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Sebab kecemasan, stres dan kepanikan sering membuat seseorang menjadi lemas, tidak berdaya dan *helples*. Ketika hal itu dibiarkan terus dan berlanjut kemungkinan tertular semakin besar.

Singkatnya *new normal* mengajak semua orang untuk beradaptasi dan merubah gaya hidup, dari yang dahulunya kebersihan sering dabaikan seperti mencuci tangan, memakai masker kini hal itu menjadi suatu keharusan dan menjadi bagian dari pola hidup sehat. Perilaku hidup social seperti berada di tempat umum mulai dihindari dan kecenderungan untuk membuat keramaian perlahan ditinggalkan. Pola hidup ini tidak hanya membuat orang berhenti berpergian tetapi juga berkumpul bersama. Tetapi di sini seseorang berhenti untuk berefleksi dan memikirkan apa yang benar-benar esensial. Seseorang diajak untuk

berdialog secara intens dengan pencipta. Di samping itu, hal yang dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah memperkuat rasa syukur bahwa masih bernafas dan masih melihat indahnya alam ciptaan. Dengan cara berada seperti itu, seseorang akan lebih menghargai kemanusiaan dan kesehatan, sehingga bersedia mengurung diri tidak keluar rumah demi kesehatan masyarakat luas. Inilah masa-masa untuk kembali ke keluarga inti, menghargai kebersamaan serta komunikasi satu sama lain sebagai satu keluarga. Inilah saat yang baik untuk belajar mengerem, melepas, dan menyalurkan emosi pada saat yang tepat (RACHMAN dan JAKOB, 2020). Persahabatan yang selama ini hanya sebatas bergembira bersama, terasa demikian berharga. Hal yang tidak kalah penting juga yang terjadi di masa pandemi ini adalah adanya sensitivitas dalam menghargai alam. Bahagia menghirup udara yang segar dan bersukacita melihat langit yang cerah. Semua keutamaan ini lahir dari rasa syukur dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan normal baru.

KESIMPULAN

Di tengah ketidakpastian landainya penyebaran Covid-19, *new normal* menjadi pilihan politik *bonum commune* yang dapat menggerakkan kembali ekonomi rakyat yang sempat terhenti karena kebijakan karantina wilayah (lockdown). Tatanan kehidupan baru ini memang tidak mudah karena harus mengubah kebiasaan. Proses ini pada awalnya mengakibatkan situasi menjadi *anomie* karena kaidah kehidupan sosial belum terbentuk sedangkan norma lama sudah usang. Tetapi dengan diberlakukannya *new normal* oleh pemerintah, optimisme dan respons masyarakat melawan Covid-19 semakin meningkat dan beragam.

Di berbagai sektor pemerintahan ditemukan kreativitas dan usaha pemerintah untuk

mendukung kebijakan normal baru disertai dengan kebijakan praktis dalam beradaptasi dengan tatanan hidup baru. Selain itu, masyarakat diajak untuk optimis hidup dalam *new normal* dengan tunduk pada aturan tatanan hidup baru. Hal ini dimulai pemerintah dengan kampanye berdamai dengan Covid-19, ajakan bersikap toleran dengan situasi, hingga kepatuhan pada protokol kesehatan seperti; menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, mengurangi kontak fisik, serta menghindari kontak dengan orang banyak. Sebab perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci optimisme dalam menghadapi gempuran Covid-19. Di samping itu, himbauan agar tetap optimis, gembira agar tidak stres dalam proses adaptasi dengan situasi *new normal* menjadi imun yang kuat untuk menangkis bahkan menghancurkan virus corona. Sebab keadaan normal baru akan nyata menjadi politik *bonum commune* jika kekuatan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi kerjasama seluruh elemen masyarakat. Karenanya dalam gempuran melawan covid-19 setiap perbedaan harus diluruhkan.

Berdasarkan hal di atas, hidup dalam tatanan dunia baru dan “berdamai” dengan virus corona bukanlah sikap menyerah kalah. Tetapi merupakan sikap antisipatif dengan kesadaran menerima kenyataan, berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan, berkerjasama dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah agar tetap bertahan hidup, adalah pilihan yang tepat untuk tetap berkarya. Karena itu, kebiasaan yang terbentuk yang telah menjadi the *new normal* di masa pandemi ini adalah prestasi yang luar biasa karena akan menghasilkan bukan hanya normal baru, melainkan juga normal yang mampu menghasilkan kebaruan peradaban politik yang sangat esensial bagi kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu

kehidupan politik *bonum commune*.

DAFTAR PUSTAKA

- HENDRANATA, ANTON .
2020. *Stimulus dan Koordinasi*. Kompas, 6.
- SANTOSO, DJOKO.
2020 *Kunci Berdamai dengan Corona*.
Kompas, 6.
- PRASOJO, EKO.
2020. “Normal Baru” Birokrasi. *Kompas*, 6.
- RACHMAN, EILEEN dan
LARASATI, DIAN.
2020. “Stay Safe, Stay Positif, Stay
Educated”. *Kompas Karier*, 7.
- EILEEN RACHMAN dan
EMILIA JAKOB.
2020. “New Normal” Berubahnya
Gaya Hidup. *Kompas Karier*, 7.
- PRANOTO, IGA IWAN.
2020. *Revolusi Pendidikan*. *Kompas*, 6.
- PLATE, JOHNNY G.
2020. *Bekerja Di Tengah Covid-19*.
Kompas, 7.
- KALLA, JUSUF.
2020. *Segi Tiga Virus Corona*. *Kompas*, 6.
- KRISTIADI, J.
2020. *Norma Baru? Ini Baru Normal*.
Kompas Analisis Politik, 1.
- CHRYSHNA, MAHATMA.
2020. *Melacak Sejarah Istilah “New
Normal”*. *Kompaspedia*.
_____.
Normal Baru Antara Optimisme dan Khawatir.
2020. *Kompas Politik dan Hukum*, 3.

_____.
2020. *Percepat Relokasi Dana untuk Covid-19*. Kompas Politik dan Hukum, 3.

ACHWAN, ROCHMAN.
2020. *Normal Baru yang Konstruktif*. Kompas, 6.

ACHWAN, ROCHMAN.
2020. *Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. Kompas, 6.

_____.
2020. *Tes Covid-19 jadi Kendala*. Kompas Umum, 15.

FARHAN, YUNA.
2020. *Anggaran Darurat Covid-19*. Kompas, 6.